



RENJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

- Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penulisan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) merupakan dokumen perencanaan yang biasanya dilaksanakan pada periode triwulan akhir tahun, tetapi karena adanya percepatan Perubahan APBD Tahun 2025 untuk menyinergikan Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025 berdasarkan SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.1/640/SJ TANGGAL 11 FEBRUARI 2025 TENTANG PENYESUAIAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan analisis dari kegiatan sebelumnya. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini disusun karena terdapat perubahan-perubahan dalam rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang sudah didiskusikan dan disetujui.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini, maka Dinas Kelautan

dan Perikanan Kota Pangkalpinang telah memiliki rencana yang rinci dan telah dijabarkan dengan skala prioritas dan sesuai dengan Dokumen Ranwal Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2022-2026.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan dapat menjadi komitmen bersama dan skenario pembelajaran rencana di tahun-tahun yang akan datang.

Perubahan Renja ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang maupun pada tahun-tahun sebelumnya. Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik pikiran maupun informasi dalam penyusunan perubahan RENJA tahun 2025 ini. Semoga RENJA perubahan anggaran ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi Pimpinan dan seluruh staf pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tahun mendatang serta dapat mendukung dan mensukseskan Visi dan Misi Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 29 Mei 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pangkalpinang



Dr. DAVID OKTAVIANDI,.SP.,MT
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197410262002121004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTARGAMBAR.....	iv
DAFTARTABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan.....	27
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	31
3.1 Tujuan dan Sasaran OPD	31
3.2 Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2025	34
BAB IV PENUTUP.....	45
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Diagram Alir Penyusunan Rencana Kerja Perubahan.....	2

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Laporan Realisasi Fisik Bulan Maret Tahun 2025	7
Tabel 2.2 Dalev Triwulan I.....	20

LAMPIRAN

	Hal
Matrik RKA Perubahan	38
Notulen Rapat Perubahan Renja	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

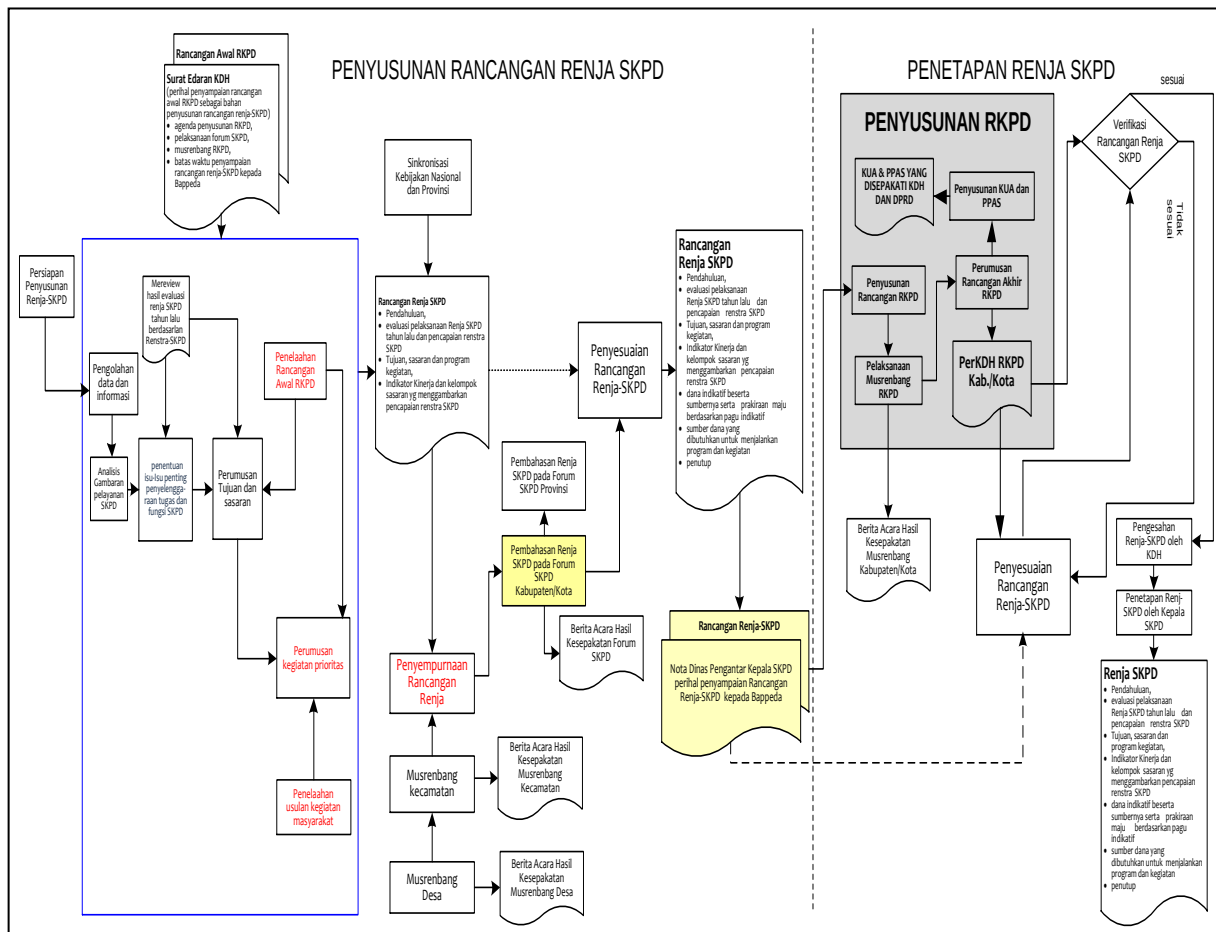
Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) transisi Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RENJA.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja SKPD. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

Proses penysusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang berdasarkan kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang dengan tetap memperhatikan program prioritas, agar didalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan, sehingga dapat memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan

Bagan alir tahapan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dapat dilihat pada **Gambar 1**.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perubahan



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN Dan Tahun Anggaran 2025
2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
3. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota

Dan Wakil Wali Kota Ulang Tahun 2025

4. Kepmenkeu Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
5. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 900.1.3/6629.A/Sj Dan 1/Mk.07/2024 Tentang Tindak Lanjut Arah Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/Sj Tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD Dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
7. Surat Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 900/9/Bakeuda/I/2025 Tanggal 13 Januari 2025 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 29 Mei 2025 tentang Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 Nomor 277;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) adalah sebagai dasar acuan dalam melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD adalah agar terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2024
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
 - 2.3 Isu-isu Rencana Penyelenggara Tupoksi SKPD
- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
 - 3.1 Tujuan dan Sasaran SKPD
 - 3.2 Program dan Kegiatan Perubahan APBD Tahun 2025
- BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Untuk mengetahui pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan program/kegiatan yang telah ditetapkan. Rata-rata realisasi seluruh Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 per maret adalah 27,92 % untuk Realisasi Kinerja dan 17,10 % untuk Realisasi Keuangan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.1** dibawah ini.

Tabel 2.1 Laporan Realisasi Fisik Bulan Maret Tahun 2025 Sumber Dana APBD Kota Pangkalpinang

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
SUMBER DANA APBD KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2025

UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BULAN : Maret 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PLAFOND DANA		REALISASI			SUMBER DANA	JENIS PEKERJAAN	KETERANGAN
		APBD INDUK	APBD PERUBAHAN	KEUANGAN		FISIK			
					%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.627.946.631,00	0,00	814.325.186,00	17,60	27,92			
3,25,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.465.104.810,00	0,00	701.694.250,00	20,25	10,22			
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.411.498.377,00	0,00	614.769.162,00	25,49	18,74			
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.411.498.377,00	0,00	614.769.162,00	25,49	18,74	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	2.411.498.377,00	0,00	614.769.162,00					
5.1.01	Belanja Pegawai	2.339.100.858,00	0,00	602.244.330,00					
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.407.474.858,00	0,00	399.444.330,00		24,99			
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.034.295.580,00	0,00	299.240.600,00					
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.034.295.580,00	0,00	299.240.600,00					
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	105.000.000,00	0,00	31.253.092,00					
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	105.000.000,00	0,00	31.253.092,00					
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	140.301.000,00	0,00	38.600.000,00					
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	140.301.000,00	0,00	38.600.000,00					
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	50.400.000,00	0,00	8.820.000,00					
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	50.400.000,00	0,00	8.820.000,00					

5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	13.923.000,00	0,00	3.680.000,00					
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	13.923.000,00	0,00	3.680.000,00					
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	61.000.000,00	0,00	17.091.120,00					
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	61.000.000,00	0,00	17.091.120,00					
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.535.278,00	0,00	755.290,00					
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.535.278,00	0,00	755.290,00					
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.000,00	0,00	4.228,00					
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.000,00	0,00	4.228,00					
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	881.122.000,00	0,00	202.800.000,00		24,99			
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	881.122.000,00	0,00	202.800.000,00					
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	881.122.000,00	0,00	202.800.000,00					
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	50.504.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.500.000,00	0,00	0,00					
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penjualan Prosuksi Usaha Daerah	2.500.000,00	0,00	0,00					
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	48.004.000,00	0,00	0,00					
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	48.004.000,00	0,00	0,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	72.397.519,00	0,00	12.524.832,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	72.397.519,00	0,00	12.524.832,00		24,99			
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	72.397.519,00	0,00	12.524.832,00					
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	63.782.767,00	0,00	11.164.608,00					
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.829.032,00	0,00	604.512,00					
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.785.720,00	0,00	755.712,00					

3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	28.000.000,00	0,00	0,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	28.000.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	28.000.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	28.000.000,00	0,00	0,00					
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.215.905,00	0,00	0,00	0,00	16,72			
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	1.547.000,00	0,00	0,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	1.547.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	1.547.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.547.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.547.000,00	0,00	0,00					
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.358.500,00	0,00	0,00	0,00	49,98	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	29.358.500,00	0,00	0,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	29.358.500,00	0,00	0,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	29.358.500,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.358.500,00	0,00	0,00		49,98			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.987.500,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.251.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	400.000,00	0,00	0,00					

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	10.920.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	0,00	0,00					
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.678.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	8.678.500,00	0,00	0,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	8.678.500,00	0,00	0,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	8.678.500,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.678.500,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.678.500,00	0,00	0,00					
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.631.905,00	0,00	0,00	0,00	16,91	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	174.631.905,00	0,00	0,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	174.631.905,00	0,00	0,00					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	174.631.905,00	0,00	0,00					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	174.631.905,00	0,00	0,00		16,91			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	174.631.905,00	0,00	0,00					
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	471.617.136,00	0,00	78.057.856,00	16,55	20,83			
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24,99	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	72.000.000,00	0,00	0,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	72.000.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	0,00	0,00		24,99			
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	72.000.000,00	0,00	0,00					

3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	8.850.000,00	0,00	0,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.850.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.850.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.440.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.650.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.760.000,00	0,00	0,00					
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	390.767.136,00	0,00	78.057.856,00	19,98	37,49	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	390.767.136,00	0,00	78.057.856,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	390.767.136,00	0,00	78.057.856,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	2.420.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.420.000,00	0,00	0,00		49,98			
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.420.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	388.347.136,00	0,00	78.057.856,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	388.347.136,00	0,00	78.057.856,00		24,99			
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	130.358.480,00	0,00	25.893.080,00					
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	103.086.784,00	0,00	20.514.464,00					
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	48.543.392,00	0,00	9.757.232,00					
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	106.358.480,00	0,00	21.893.080,00					

3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.773.392,00	0,00	8.867.232,00	2,61	15,27			
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.981.696,00	0,00	4.488.616,00	7,24	24,99	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	61.981.696,00	0,00	4.488.616,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	61.981.696,00	0,00	4.488.616,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	23.731.696,00	0,00	4.488.616,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.731.696,00	0,00	4.488.616,00		24,99			
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	21.931.696,00	0,00	4.488.616,00					
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.800.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	38.250.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.250.000,00	0,00	0,00		24,99			
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.250.000,00	0,00	0,00					
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12,50	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	25.500.000,00	0,00	0,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.000.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.000.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	19.500.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.500.000,00	0,00	0,00		24,99			

5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	19.500.000,00	0,00	0,00					
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	252.291.696,00	0,00	4.378.616,00	1,74	8,33	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	22.291.696,00	0,00	4.378.616,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	22.291.696,00	0,00	4.378.616,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	1.020.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.020.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.020.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	21.271.696,00	0,00	4.378.616,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.271.696,00	0,00	4.378.616,00		24,99			
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.271.696,00	0,00	4.378.616,00					
5,2	BELANJA MODAL	230.000.000,00	0,00	0,00					
5,2,05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	230.000.000,00	0,00	0,00					
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	230.000.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	230.000.000,00	0,00	0,00					
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	230.000.000,00	0,00	0,00					
3,25,03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	259.696.676,00	0,00	28.271.696,00	10,89	12,50			
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	140.115.088,00	0,00	15.135.848,00	10,80	12,50			
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	75.815.088,00	0,00	15.135.848,00	19,96	24,99	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	75.815.088,00	0,00	15.135.848,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	75.815.088,00	0,00	15.135.848,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	75.815.088,00	0,00	15.135.848,00					

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	75.815.088,00	0,00	15.135.848,00		24,99			
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	75.815.088,00	0,00	15.135.848,00					
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	64.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	64.300.000,00	0,00	0,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	64.300.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	64.300.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	64.300.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	64.300.000,00	0,00	0,00					
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.25.03.2.02.003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, bantuan pembiayaan, Kemitraan usaha	53.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	53.700.000,00	0,00	0,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	53.700.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	800.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	800.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	50.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	50.400.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	30.000.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.02.01.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	30.000.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02.01.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	20.400.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	20.400.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	0,00	0,00					

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00	0,00	0,00					
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	65.881.588,00	0,00	13.135.848,00	19,94	24,99			
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	65.881.588,00	0,00	13.135.848,00	19,94	24,99	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	65.881.588,00	0,00	13.135.848,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	65.881.588,00	0,00	13.135.848,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	2.066.500,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.066.500,00	0,00	0,00		24,99			
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan - bahan kimia	560.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	972.500,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	534.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	63.815.088,00	0,00	13.135.848,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	63.815.088,00	0,00	13.135.848,00		24,99			
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.271.696,00	0,00	4.378.616,00					
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	21.271.696,00	0,00	4.378.616,00					
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.271.696,00	0,00	4.378.616,00					
3,25,04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	796.765.864,00	0,00	84.359.240,00	10,59	5,21			
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	29.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	29.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APBD Kota PKP		
5.01	BELANJA OPERASI	29.800.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	29.800.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.800.000,00	0,00	0,00		0,00			

5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk dijual /diserahkan kepada masyarakat	6.600.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	900.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	22.000.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	22.000.000,00	0,00	0,00					
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	766.965.864,00	0,00	84.359.240,00	11,00	10,41			
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	96.275.088,00	0,00	15.635.848,00	16,24	8,33	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	96.275.088,00	0,00	15.635.848,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	96.275.088,00	0,00	15.635.848,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	660.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	660.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	660.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	78.815.088,00	0,00	15.635.848,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	78.815.088,00	0,00	15.635.848,00		24,99			
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	78.815.088,00	0,00	15.635.848,00					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.800.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.800.000,00	0,00	0,00					
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	670.690.776,00	0,00	68.723.392,00	10,25	12,50	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	670.690.776,00	0,00	68.723.392,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	670.690.776,00	0,00	68.723.392,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	238.707.728,00	0,00	15.180.000,00					

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	238.707.728,00	0,00	15.180.000,00		24,99			
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	17.278.500,00	0,00	15.180.000,00		24,99			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.112.828,00	0,00	0,00		24,99			
5.1.02.01.01.0009	Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran	1.840.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.01.01.0012	Belanja bahan -bahan lainnya	4.990.000,00	0,00	0,00		24,99			
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.564.400,00	0,00	0,00		24,99			
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	4.822.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.700.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	194.400.000,00	0,00	0,00		99,96			
5.1.02.02	Belanja Jasa	282.532.048,00	0,00	53.543.392,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	282.532.048,00	0,00	53.543.392,00		24,99			
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	45.543.392,00	0,00	9.257.232,00					
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	215.716.960,00	0,00	39.907.544,00					
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.271.696,00	0,00	4.378.616,00					
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	149.451.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	110.000.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung -Bangunan gedung tempat kerja -Bangunan gedung tempat kerja lainnya	110.000.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.451.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan - jaringan listrik - jaringan listrik lainnya	39.451.000,00	0,00	0,00					
3,25,06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	106.379.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	106.379.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	106.379.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	106.379.281,00	0,00	0,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	106.379.281,00	0,00	0,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	87.629.281,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	87.629.281,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	5.179.281,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat /bahan untuk kegiatan kantor- Benda Pos	50.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.100.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	75.000.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	800.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.050.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	8.600.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.100.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.100.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.000.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.500.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000,00	0,00	0,00					

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.250.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas dalam kota	1.250.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.900.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.900.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	8.900.000,00	0,00	0,00					

Tabel 2.4 DALEV Triwulan I

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	032501	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	80	3.465.104.810	0,00	855.277.083	0			0		0	0	855.277.083	0	25	SEKRETARIS (Dinas Kelautan dan Perikanan)
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	69,7		71,2							71			102		SEKRETARIS (Dinas Kelautan dan Perikanan)
8		032501202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	2.411.498.377	25	715.432.016	0			0		0	25	715.432.016	25	30	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN KEUANGAN
9		032501202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	20	2.411.498.377	19	715.432.016						19	715.432.016	95	30	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
12		032501205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	-50	28.000.000		0	0			0		0	0	0	0	0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
14		032501205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	4	28.000.000		0						0	0	0	0	0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
15		032501206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	214.215.905		28.304.985	0			0		0	0	28.304.985	0	13	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
16		032501206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1.547.000		0						0	0	0	0	0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
17		032501206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	29.358.500		0						0	0	0	0	0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
18		032501206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	8.678.500		0						0	0	0	0	0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

19		032501206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	174.631.905	1	28.304.985					1	28.304.985	100	16	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
24		032501208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	471.617.136	25	90.383.150		0		0	25	90.383.150	25	19	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
25		032501208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	72.000.000	1	12.325.294					1	12.325.294	100	17	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
26		032501208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	8.850.000		0					0	0	0	0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
27		032501208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	390.767.136	1	78.057.856					1	78.057.856	100	20	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
28		032501209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	339.773.392	25	21.156.932		0		0	25	21.156.932	25	6	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
29		032501209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	61.981.696	1	11.693.616					1	11.693.616	100	19	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
30		032501209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	4	25.500.000	2	5.084.700					2	5.084.700	50	20	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
31		032501209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	3	252.291.696		4.378.616					0	4.378.616	0	2	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															51,076	24,683	
PREDIKAT KINERJA																	
33	-	032503	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Dengan Satuan:Ton)	1.649,33	259.696.676	165,65	28.271.696		0		0	166	28.271.696	10	11	PERIKANAN TANGKAP
				Cakupan bina kelompok perikanan tangkap (Dengan Satuan:%)	66,67		17,00						17		25		PERIKANAN TANGKAP
34		032503201	Pengelolaan prasarana ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan sarana prasarana usaha perikanan tangkap (Dengan Satuan:dokumen)	1	140.115.088	1	15.135.848		0		0	1	15.135.848	100	11	KASI PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL

35		032503201001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Daerah dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dengan Satuan:Dokumen)	1	75.815.088	1	15.135.848						1	15.135.848	100	20	KASI PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
36		032503201002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Dengan Satuan:Unit)	4	64.300.000		0						0	0	0	0	KASI PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
37		032503202	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kelompok nelayan yang terfasilitasi (Dengan Satuan:laporan)	3	53.700.000		0		0			0	0	0	0	0	KASI PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
38		032503202003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Dengan Satuan:Unit Usaha)	250	53.700.000		0						0	0	0	0	KASI PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
39		032503203	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya Tempat Pelayanan Pelelangan hasil Perikanan (Dengan Satuan:layanan)	1	65.881.588	1	13.135.848		0			0	1	13.135.848	100	20	KASI PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
40		032503203002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dengan Satuan:Layanan)	1	65.881.588	1	13.135.848						1	13.135.848	100	20	KASI PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																17,771	10,886	
PREDIKAT KINERJA																		
41	-	032504	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan Budidaya (Dengan Satuan:ton)	850	796.765.864	67,67	85.359.240		0			0	68	85.359.240	8	11	PERIKANAN BUDIDAYA
				Cakupan bidang kelompok perikanan budidaya (Dengan Satuan:%)	96		35,00							35		36		PERIKANAN BUDIDAYA
42		032504202	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembinaan Kelompok (Dengan Satuan:kali)	25	29.800.000		0		0			0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR BINA USAHA PERIKANAN
44		032504202004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Kelompok)	20	29.800.000		0						0	0	0	0	SUB KOORDINATOR BINA USAHA PERIKANAN
47		032504204	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (Dengan Satuan:dokumen)	1	766.965.864	1	85.359.240		0			0	1	85.359.240	100	11	SUB KOORDINATOR PEMBENIHAN IKAN DAN KESEHATAN IKAN
48		032504204001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	96.275.088	1	15.635.848						1	15.635.848	100	16	SUB KOORDINATOR SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA
49		032504204002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit)	1	670.690.776	1	69.723.392						1	69.723.392	100	10	SUB KOORDINATOR PEMBENIHAN IKAN DAN KESEHATAN IKAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																22,210	10,713	
PREDIKAT KINERJA																		

50	-	032506	P R O G R A M PENGOLAHAN PEMASARAN PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan kg/kapita /tahun	69,73	106.379.281	18,50	0	0	0	0	0	19	0	27	0	PERIKANAN TANGKAP
				Persentase unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina memenuhi standart mutu dan kemanan pangan (Dengan Satuan:%)	56	106.379.281	15	0	0	0	0	0	15	0	27	0	PERIKANAN TANGKAP
51		032506201	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan yang diterbitkan (Dengan Satuan:dokumen)	1	106.379.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR BINA USAHA PERIKANAN
52		032506201001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan R i s i k o (D e n g a n Satuan:Dokumen)	1	106.379.281	0					0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR BINA USAHA PERIKANAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															26,531	0,000	
PREDIKAT KINERJA																	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)															29,397	11,571	
PREDIKAT KINERJA																	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				1. untuk mengatasi tingginya harga pakan digunakan pakan alternatif seperti maggot,belicot, daun kelor dll melalui pembuatan pakan ikan mandiri, mengatasi penyakit ikan dengan melakukan pembinaan CPIB.													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				1. rendahnya target budidaya disebabkan ada beberapa pembudidaya tidak beroperasi disebabkan tingginya harga pakan,dan cuaca ekstrim sehingga menyebabkan banyak penyakit dan kematian ikan 2. karena efisensi anggaran dari pusat maka untuk angka konsumsi ikan perhitungan dilakukan oleh dkp prov berdasarkan data susenas.													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:																	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Pada Tahun 2025 triwulan I Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki 4 (empat) Program, dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

dengan rata-rata capaian kinerja :

- Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah
(Dengan Satuan:Nilai) :nol (belum ada penilaian)
- Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai) :71,20

yang dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator :Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator :Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator:Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator :Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator :Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator :Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik
Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator : Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
Indikator : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Indikator : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara
- Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
Indikator : Jumlah Gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara

2. Program Pengolahan Perikanan Tangkap dengan rata-rata capaian kinerja :

- Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Dengan Satuan: Ton) 165,646 ton
- Cakupan bina kelompok perikanan tangkap (Dengan Satuan: %) : 17 %

yang dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengolahan Penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

Indikator :Jumlah dokumen yang tervalidasi

- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

Indikator : Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia

2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

Indikator : Jumlah Kelompok Nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan

3. Pengolahan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

- Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Indikator : Jumlah UPT TPI yang beroperasi

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan rata-rata capaian kinerja :

- Peningkatan produksi perikanan Budidaya (Dengan Satuan:ton) 67,67 Ton
- Cakupan bidang kelompok perikanan budidaya (Dengan Satuan:%) :35%

yang dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Indikator : Jumlah pokdakan yang mendapat pendampingan

2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota

- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan rata-rata capaian kinerja :

- Angka konsumsi Ikan (AKI) dengan satuan kg/kapita/tahun realisasi TW I :18,5
- Persentase unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina memenuhi standart mutu dan keamanan pangan (Dengan Satuan:%) 15 %

1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten /Kota berdasarkan skala usaha dan resiko.

Indikator : Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Resiko

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan

Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

- i. Menurunnya produksi perikanan tangkap
- ii. Menurunnya produksi perikanan budidaya
- iii. Belum optimalnya pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan budidaya.

- iv. Belum optimalnya produktivitas pengolahan hasil perikanan serta legalitas produk hasil perikanan dan ,masih rendahnya daya saing produk olahan hasil perikanan.
- v. Masih adanya anak2 terdampak stunting di Lokus Kota Pangkalpinang

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
. 1. Pelimpahan wewenang sesuai dgn uu no 23 tahun 2014 belum tuntas sampai dengan sekarang dan kewenangan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan belum diserahkan ke kabupaten Kota 2. urusan ke pelabuhan seperti rekomendasi BBM masih dilaksanakan kab/kota dan belum adanya dasar hukum yang mengatur pembelian BBM penugasan(pertalite) utk nelayan motor temple 3. Peruntukan kawasan perikanan baik lahan dan kolong belum dipetakan secara jelas dan Maraknya alih fungsi lahan budidaya untuk kegiatan non budidaya. 4. Banyaknya pembudidaya ikan yang belum menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang baik)	1. Belum adanya kejelasan terkait Kewenangan Pengelolaan TPI antara Provinsi Babel dan Kabupaten/Kota dan Belum adanya UPT PPP (Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai)Muara Batu Rusa supaya penyelenggaraan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan dapat terlaksana dan optimal 2. Lambatnya proses penyelesaian /penyerahan terkait Pengelolaan TPI 3. Tidak ada payung hukum wilayah dan zonasi untuk perikanan budidaya sehingga tidak beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman atau kawasan industri 4. Penerapan CBIB yang belum optimsl sehingga masih ditemui kasus serangan hama penyakit ikan.	1. Dikeluarkannya perda provinsi tentang pembentukan pelabuhan Perikanan pantai muara sungai batu rusa bahwa pelimpahan wewenang yang seharusnya dilaksanaka oleh provinsi babel bukan dlaksanakan oleh Kabupaten/Kota 2. dikeluarkannya peraturan BPH Migas khusus mengatur pembelian BBM penugasan(Pertalite) Khusus Bagi nelayan 3. Adanya komitmen dari pemerintah Kota Pangkalpinang untuk perikanan agar tidak terjadi pengurangan areal untuk perikanan 4. Adanya peningkatan kebutuhan benih ikan di kota Pangkalpinang dan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang dapat dijadikan sebagai

5. Nelayan belum menaati kaidah penangkapan ikan yang ramah lingkungan	5. Penangkapan ikan masih menggunakan peralatan yang sederhana	sentra penghasil benih ikan berkualitas di Kota Pangkalpinang
6. Belum berkembangnya diversifikasi pengolahan hasil pengolahan untuk menambah nilai tambah produk pengolahan hasil perikanan.	6. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan bagi pengusaha/ POKLAHSAR hasil perikanan untuk melaksanakan prinsip pengolahan ikan yang baik dan benar	5. Pemberian bantuan Sarana dan prasarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan.
7. Masih adanya anak-anak stunting di Lokus kota Pangkalpinang	7. Kurangnya minat anak-anak untuk mengkonsumsi ikan	6. Adanya kebutuhan pasar yang tinggi untuk produk hasil pengolahan ikan sehingga diperlukan Bimbingan teknis dan pelatihan bagi pengusaha/POKLAHSAR dan Adanya fasilitasi dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha produk pengolahan Hasil perikanan
8. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi bagi Masyarakat Khususnya Nelayan, Pembudiaya Ikan dan Pelaku Usaha terkait informasi dan data perikanan	8. Kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi bagi Masyarakat Khususny Nelayan, Pembudidaya ikan dan pelaku usaha	7. Mengadakan Sosialisasi 1 Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) di Lokus Stunting di Kota Pangkalpinang
		8. Mengadakan Pelatihan dan membuat inovasi terkait teknologi informasi

Kekuatan (Stength)
1. Tersedianya landasan hukum yang jelas dan mengacu pada bidang Perikanan
2. Tersedianya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) tenaga perikanan
3. Adanya pendanaan bagi pelaksanaan urusan Perikanan
4. Tersedianya layanan bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung .

5. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan

Dalam penyusunan rencana kerja perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dilakukan penetapan skala prioritas permasalahan-permasalahan yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah. Rincian isu-isu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan budidaya;
2. Belum optimalnya produktivitas pengolahan hasil perikanan serta legalitas produk hasil perikanan dan ,masih rendahnya daya saing produk olahan hasil perikanan;
3. Keterbatasan akses sumber data, sehingga keakuratan data perikanan masih harus disempurnakan;
4. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) perikanan;
5. Masih sering terjadi kerusakan wilayah pesisir dan sumberdaya ikan oleh masyarakat;
6. Mutu hasil tangkapan masih rendah;
7. Iklim yang tidak menentu, sehingga mempengaruhi hasil tangkapan nelayan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN APBD TAHUN 2025

3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Kelautan dan perikanan 2024-2026 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024-2026.

Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang untuk OPD Pengampu Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang adalah Tujuan 2 yaitu : “Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang berdaya saing” dengan indikator tujuan Tingkat kemiskinan. Dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang untuk OPD Pengampu Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang adalah Sasaran 5 yaitu :Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan indikator sasaran Gini Rasio.

a. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah

1. Meningkatkan Nilai TukarNelayan (NTN).
2. Meningkatkan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)

Dengan Indikator Tujuan

1. Nilai Tukar Nelayan /NTN (%)

2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan /NTPI (%)

b. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap (%)
2. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya (%)
3. Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan /AKI (kg/kapita/Tahun)

Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dapat dilihat hubungan tujuan dan sasaran RPD dengan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Renstra Dinas

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Target		
						2024	2025	2026
RPD Kota Pangkalpinang								
Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur melalui pengelolaan lingkungan hidup	Tingkat kemiskinan					4,25	4,2	4,15
		Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Gini ratio			0.243	0,235	0,233
Renstra Dinas Kelautan dan								

Perikanan								
Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai Tukar Nelayan (NTN)			Jumlah Nilai Tukar Nelayan tahun berkenaan / Target Nilai Tukar Nelayan tahun berkenaan x 100%	%	113,77	114,05	114,34
		Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap tahun berkenaan(ton) / Target produksi tangkap tahun berkenaan (ton) x 100%	%	90,90	90,91	90,91
		Meningkatnya angka konsumsi ikan	angka konsumsi ikan per tahun	jumlah konsumsi ikan (kg)/target konsumsi ikan tahun berkenaan x 100%	%	98,02	98,04	98,33
Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)			Jumlah Nilai Tukar Nelayan tahun berkenaan / Target Nilai Tukar tahun berkenaan x 100%	%	92	92,5	93
		meningkatkan produksi perikanan budidaya	produksi perikanan budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya tahun berkenaan (ton)/target produksi ikan budidaya tahun berkenaan (ton) x 100%	%	95	96,47	100

a. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai

dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang adalah

1. Meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN).

b.Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap (%)
2. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya (%)
3. Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan/AKI (%)

3.2 Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2025

Program yang mengalami perubahan dalam Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 diantaranya adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

➤ Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

➤ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

➤ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator :Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

➤ Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan Listrik

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

➤ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

➤ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

➤ Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

➤ Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan

Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

- Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

2. Program Pengolahan Perikanan Tangkap dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengolahan Penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

Indikator : Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia

- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

Indikator : Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia

2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

Indikator : Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

3. Pengolahan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

- Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Indikator : Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya yang dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Indikator : Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten /Kota berdasarkan skala usaha dan resiko.

Indikator : Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Resiko

dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhir Perio de Rens tra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahu n 2023	Prakir aan Capai an Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasio nal					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							5.516.742.005,00	4.627.946.631,00	4.861.434.134,60					5.820.079.950,00			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							5.516.742.005,00	4.627.946.631,00	4.861.434.134,60					5.820.079.950,00			
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							5.516.742.005,00	4.627.946.631,00	4.861.434.134,60					5.820.079.950,00			
1	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah				69,780 Nilai Nilai	69,780 Nilai Nilai	4.534.593.175,00	3.465.104.810,00	3.691.160.550,60						4.755.014.202,00		
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	-			100 %	100 %	2.723.846.675,00	2.411.498.377,00	2.411.498.377,00			-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-	2.852.659.296,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.723.846.675,00	2.411.498.377,00	2.867.791.335,60	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN TRANSFER DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem		2.852.659.296,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	-			-50 %	-50 %	140.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00			-	Percepatan Penanganan Kemiski	-	147.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	174.631.905,00	76.191.209,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	-				100 %	100 %	29.400.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-		60.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	2 Unit	29.400.000,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			60.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 %	100 %	563.270.000,00	471.617.136,00	471.617.136,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-		553.094.006,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			75.600.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	8.850.000,00	8.850.000,00	14.600.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			5.512.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	482.420.000,00	390.767.136,00	375.563.364,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			471.981.506,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

	3	2	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	-		100 %	100 %	837.550.000,00	339.773.392,00	339.773.392,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-		896.910.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	43.810.000,00	61.981.696,00	61.981.696,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			42.052.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	4 Unit	152.720.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			182.857.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			5 Unit	3 Unit	641.020.000,00	252.291.696,00	172.291.696,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			672.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan bina kelompok perikanan tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap			1649.3366,67 Ton %	66,67 1649.33 % Ton	179.956.000,00	259.696.676,00	244.371.520,00							223.078.275,00	
	3	2	0	2.		Pengelolaan Penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)	Jumlah data dan sarana prasarana usaha perikanan tangkap	-		1 Dokumen	1 Dokumen	113.812.500,00	140.115.088,00	140.115.088,00			-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		95.475.975,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

[illegible]

							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraa n Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	1 Layanan	7.993.500,00	65.881.588,00	65.881.588,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			6.285.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan Budidaya Cakupan bidang kelompok perikanan budidaya				85096 Ton %	85096 Ton %	695.313.549,00	796.765.864,00	849.602.064,00							688.079.228,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembinaan Kelompok	-			25 Kali	25 Kali	313.655.821,00	29.800.000,00	29.800.000,00			-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		336.394.612,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																	
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraa n Pendidikan dan Pelatihan				20 Kelompok	20 Kelompok	313.655.821,00	29.800.000,00	22.300.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			336.394.612,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-			1 Dokumen	1 Dokume n	381.657.728,00	766.965.864,00	766.965.864,00			-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		351.684.616,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokume n	54.660.000,00	96.275.088,00	84.145.088,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			50.337.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	326.997.728,00	670.690.776,00	743.156.976,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem				301.347.616,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase unit pengolahan ikan (UPI) yang memenuhi standart mutu dan kewanan pangan				55 %	55 %	106.879.281,00	106.379.281,00	76.300.000,00								153.908.245,00	
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan yang diterbitkan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	106.879.281,00	106.379.281,00	106.379.281,00			-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-			153.908.245,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	106.879.281,00	106.379.281,00	76.300.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem				153.908.245,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	J U M L A H												5.516.742.005,00	4.627.946.631,00	4.861.434.134,60							5.820.079.950,00		

BAB IV

PENUTUP

4.1 Penutup

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 bertujuan untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2025. Dengan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang dapat diketahui capaian target dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya dan tahun yang berjalan. Sehingga dapat diketahui pencapaian kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis (RENSTRA) dan dilakukan percepatan pencapaian target yang belum tercapai pada tahun selanjutnya.

Seluruh elemen pelaksana di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan ini. Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja. Adanya perubahan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu bidang dan lintas bidang, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja Perubahan ini merupakan program

dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi serta ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan di masa mendatang akan lebih baik.

Pangkalpinang, 29 Mei 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pangkalpinang



Dr. DAVID OKTAVIANDI, SP., MT
Pembina Tingkat I/ IVb
NIP. 197410262002121004